

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era saat ini, Isu lingkungan bukan lagi menjadi masalah individu yang dapat diselesaikan oleh masing-masing individu itu sendiri, namun sudah menjadi masalah bersama yang mana diperlukan suatu solusi yang juga disepakati oleh bersama. Salahsatu isu penting mengenai lingkungan yang jika dibiarkan akan berdampak cukup besar bagi kehidupan di bumi adalah *Climate Change* atau yang biasa disebut dengan perubahan iklim. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Kerangka Kerja Perubahan Iklim atau yang disebut sebagai *United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*, perubahan iklim diakibatkan oleh sejumlah aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengubah komposisi atmosfer global dan variabilitas iklim alami. Komposisi atmosfer global yang dimaksud berupa Gas Rumah Kaca (GRK) yang mana merupakan komposisi material atmosfer bumi dan di dalamnya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan lain-lain (Knowledge Centre, 2017).

Kegiatan manusia yang berdampak besar pada iklim yaitu pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batubara, serta gas-gas yang menghasilkan gas karbon dioksida. Menurut penelitian, pembakaran tersebut akan melepas CO<sub>2</sub> dalam jumlah yang sangat besar ke atmosfer sehingga emisi karbon yang dihasilkan akan terus mengalami peningkatan yang berdampak pada pemanasan global (Satya, 2013) . Aktifitas ini telah berlangsung semenjak revolusi industri mulai

bermunculan. Tercatat data ditahun 2014 yang menjelaskan bahwa terdapat 6 negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia yang tak lain menjadi faktor penyebab utama perubahan iklim yaitu diantaranya China, Amerika Serikat, Uni Eropa, India sebesar, Rusia, dan Jepang. Data tersebut menunjukkan bahwa emisi karbon yang dihasilkan masing-masing negara telah melewati ambang batas maksimal (Rifqi, 2018).

Kenaikan jumlah emisi karbon menyebabkan adanya perubahan iklim yang akan banyak mengganggu aktivitas manusia di bumi seperti menurunnya kualitas dan kuantitas air, gagal panen akibat kekeringan, cuaca yang tidak menentu yang menjadikan nelayan sulit melaut, meningkatnya jumlah hama dan penyakit yang akan berdampak pada kesehatan manusia di bumi, dan mencairnya es di kutub utara yang dapat menyebabkan naiknya permukaan laut sehingga mengakibatkan daerah-daerah di pinggir pantai terendam banjir. Oleh karena begitu banyaknya dampak yang dihasilkan dari isu perubahan iklim dan tak hanya satu negara saja yang akan merasakan, maka diperlukannya kerjasama yang melibatkan antar negara di dunia (Lestari-Jakarta).

Sadar akan besarnya dampak daripada perubahan iklim, maka Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan suatu Konferensi Tingkat Tinggi pada tanggal 9 Mei 1992 yang berlokasi di Rio de Janeiro, Brazil. Konferensi ini bernama *United Nation Conference on Environment and Development*. Melalui konferensi tersebut dilahirkan suatu konvensi yang disebut sebagai Konvensi Perubahan Iklim PBB (*United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC*). Dengan berlakunya konvensi, maka dimulailah pertemuan para pihak yang mana pertemuan itu disebut sebagai *Conference of the Parties (COP)* untuk menyepakati komitmen dan tindak lanjut dari UNFCCC. Setiap tahunnya, *Conference of the Parties* dilakukan yang mana

hingga kini pada tahun 2019 total pertemuan yang telah berlangsung berjumlah 24 (dua puluh empat) kali pertemuan dan akan dilakukan pertemuan selanjutnya yaitu COP-25 dibulan Desember 2019 mendatang.

Ada berbagai poin penting yang dihasilkan dalam setiap pertemuannya seperti pada COP-3 yang berlangsung pada tahun 1997 dan berlokasi di Kyoto, Jepang menghasilkan suatu protokol yang disebut Protokol Kyoto 1997. Selanjutnya setelah berbagai pertemuan diadakan dan ketika dirasa adanya ketidakefektifan protokol tersebut, maka dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya mulailah dibahas suatu bentuk lain daripada protokol yang mana dapat bersifat lebih mengikat, hingga sampai pada COP-21 yang berlangsung tahun 2015 dan berlokasi di Paris, Perancis menghasilkan suatu perjanjian sebagai pengganti *Protocol Kyoto* yaitu *Paris Agreement*. *Paris Agreement* atau Perjanjian Paris (PP) akan mulai diberlakukan pada tahun 2020 mendatang setelah mendapat ratifikasi dari berbagai negara (Ridha, 2016).

Perjanjian Paris dianggap sebagai suatu pencapaian kesepakatan tertinggi dalam satu dekade terakhir dunia internasional sebagai bentuk upaya penurunan emisi serta pengendalian perubahan iklim. Terdapat 3 target yang ingin dicapai dalam kesepakatan ini diantaranya yaitu membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celcius dari tingkat pra-industri dan membatasi hingga di bawah 1.5 derajat celcius, meningkatkan kemampuan negara-negara untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, serta membuat alur keuangan yang konsisten menuju emisi gas rumah kaca yang rendah. Menurut kesepakatan, Perjanjian Paris dapat berjalan sesuai tujuan jika telah diratifikasi setidaknya oleh 55 negara yang menyumbangkan paling tidak 55% emisi gas rumah kaca (Rifqi, 2018, p. 2).

Tercatat data bahwa tingkat partisipasi dalam awal terbentuknya perjanjian ini cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan terdapatnya 171 negara yang telah menandatangani Perjanjian Paris dan 13 negara yang langsung mendepositkan instrumen ratifikasi pada 22 April 2016 dalam acara pertemuan di New York, Amerika. Berbeda dengan agenda sebelumnya yaitu *Protokol Kyoto* yang mana ditandai dengan absennya negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam isu perubahan iklim seperti Amerika dan Australia, Perjanjian Paris juga ikut ditandatangani oleh negara-negara dengan tingkat emisi tinggi seperti Amerika, China, Uni Eropa, Rusia, India, dan Jepang (Retaduari, 2017).

Amerika merupakan satu-satunya negara yang sampai saat ini masih dijuluki sebagai negara *superpower* di dunia. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan negara tersebut tentunya sangat berpengaruh bagi negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu, dukungan serta peran dari Negara Amerika sangatlah diperlukan bagi seluruh pihak-pihak internasional dalam mengatasi isu perubahan iklim. Dalam dua periode kepemimpinan presiden yang berbeda, Amerika menunjukkan sikap yang berbeda bahkan justru berbanding terbalik. Hal ini terjadi pada saat Amerika berada dibawah kepemimpinan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump.

Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Barack Obama menunjukkan respon yang berbeda dalam menanggapi isu perubahan iklim jika dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya. Obama menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas utamanya sejak beliau terpilih menjadi presiden ditahun 2009. Selama masa jabatannya, Obama banyak mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan isu lingkungan diantaranya menerapkan larangan penggunaan *Microbread*, mengadakan *Clean Power Plan* untuk mengatasi polusi

karbon domestik yang bersumber dari pembangkit listrik, serta melibatkan Amerika untuk aktif dalam berbagai pertemuan internasional mengenai perubahan iklim dari *Conference of the Parties (COP)* ke 13 hingga ke 24 yang mana salahsatu konferensi perubahan iklim yang diratifikasi Amerika masa pemerintahannya adalah Perjanjian Paris. Obama meratifikasi Perjanjian Paris bersamaan dengan Cina tepatnya pada tanggal 3 September 2016 (Park, 2017).

Dibawah kepemimpinan Barack Obama, Amerika sepenuhnya mendukung Perjanjian Paris yang dianggapnya sebagai bentuk upaya penyelamatan planet yang menjadi tempat tinggal semua warga di dunia termasuk warga negaranya. Walaupun kebijakan Obama tersebut sempat tidak mendapat dukungan dari kongres khususnya dari Partai Republik, namun Obama tetap melanjutkan kebijakan dengan menggunakan hak vetonya sebagai presiden. Dalam mendukung upayanya terhadap kesepakatan *Paris Agreement*, Obama telah menyumbangkan dana sejumlah 3 Milyar US\$ yang dipakai untuk tujuan investasi energi bersih, peningkatan debit air laut, kekeringan, banjir, dan kerusakan lainnya yang diakibatkan perubahan iklim khususnya kepada negara-negara berkembang (Green Climate Fund, 2018).

Ditahun 2017, masa kepemimpinan Barack Obama berakhir dalam dua periode yang kemudian digantikan oleh presiden Amerika Serikat terpilih yaitu Donald Trump. Kala itu, Donald Trump maju menjadi kandidat pemilihan presiden AS untuk periode 2016-2020 mewakili Partai Republik dan mampu mengalahkan lawan politiknya yang bernama Hillary Clinton yang merupakan wakil dari partai Demokrat. Pemilihan Presiden tersebut sukses menjadikan Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45. Namun dibawah kepemimpinan Trump, Amerika banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berbanding terbalik dengan apa yang menjadi kebijakan

Obama sebelumnya. Banyak kebijakan Trump yang dianggap kontroversial dan ditentang banyak pihak, baik itu pihak yang berasal dari domestik Amerika maupun pihak-pihak internasional.

Salahsatu kebijakan Trump yang banyak mendapatkan pertentangan yaitu mengenai kesepakatan Perjanjian Paris. Tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2017 melalui Duta Besar Amerika Serikat – PBB yaitu Nikki Haley, sesuai dengan regulasi yang tertera dalam artikel 28.1, Trump mengirimkan surat pemberitahuan pengunduran diri dari Perjanjian Paris yang diberikan kepada Sekretaris Umum PBB setelah sebelumnya sempat mengumumkan rencana tersebut melalui pidatonya di Gedung Putih pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 pukul 03.00 sore waktu setempat (Mathiesen, 2017).

Donald Trump menyebut kesepakatan Paris sebagai “*Draconian International Deal*” atau yang dalam Bahasa Indonesia merupakan perjanjian internasional yang kejam. Walaupun kebijakan Trump saat itu banyak mendapat protes keras dari masyarakat Amerika Serikat sendiri salahsatunya protes yang berasal dari komunitas masyarakat yang aktif dalam upaya melestarikan lingkungan dan makhluk hidup, namun protes-protes tersebut tidak menjadikan Trump mengubah kebijakannya untuk mundur dari Perjanjian Paris, suatu perjanjian mengenai isu lingkungan khususnya perubahan iklim yang mana telah disepakati Amerika sejak dibawah pemerintahan Barack Obama (Whitehouse, 2017).

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Obama sangat berbanding terbalik dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump dalam merespon isu lingkungan khususnya pada kesepakatan Perjanjian Paris. Fakta ini cukup menarik untuk dikaji dan akan menjadi bahasan dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah paparkan di atas, maka rumusan masalah yang di tarik: “Mengapa terjadi perbedaan kebijakan antara Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump terhadap Perjanjian Paris?”

## **C. Landasan Teori**

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka penulis menggunakan teori persepsi sebagai alat analisis agar mampu menjelaskan mengapa terdapat perbedaan kebijakan antara Barack Husein Obama dan Donald Trump ketika keduanya menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dalam masing-masing periode.

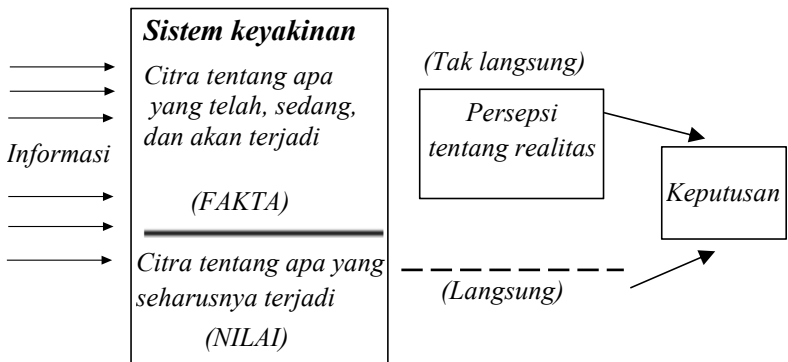
### **Teori Persepsi**

Teori persepsi merupakan teori yang mampu menjelaskan bagaimana terbentuknya suatu keputusan atau kebijakan dengan didasari oleh persepsi individu terkait pelaku pembuat keputusan. Dalam teori persepsi, peranan individu dijadikan variabel yang mana mampu menjelaskan fenomena internasional. Dalam buku Mochtar Mas'oe'd yang berjudul *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*, dikatakan bahwa persepsi atau citra yang dimiliki setiap individu di dunia bersifat dinamis. Persepsi ini dipengaruhi oleh proses psikologik yang membentuk kepribadiannya sehingga mampu mempengaruhi perilaku individu tersebut (Mas'oe'd, 1998). Di arena hubungan internasional, para pembuat keputusan negara dipengaruhi oleh persepsinya dalam menentukan perilaku, tanggapan, atau keputusan suatu negara mengenai situasi tertentu.

Menurut pandangan Walter S Jones, persepsi terdiri dari 3 komponen yang mana diantaranya yaitu: nilai, keyakinan, dan pengetahuan. Nilai merupakan hal yang dianggap sebagai sesuatu yang benar serta keterpihakan seseorang terhadap suatu realitas tertentu yang menjadi konsep dari apa yang diinginkan. Keyakinan merupakan pembenaran atas nilai, dan pengetahuan merupakan suatu data atau informasi yang diterima seseorang dari lingkungan luar (Jones W. S., 1992, p. 276). Berikut terdapat hubungan antara sistem keyakinan, persepsi, dan keputusan politik luar negeri yang dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.

**Gambar 1.1**

**Skema Hubungan Persepsi dan Keputusan**



(Ole R. Holsti dalam Mochtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi*, 1998, hal. 21.)



Holsti mengatakan dalam bukunya bahwa nilai, keyakinan, dan pengetahuan dapat memengaruhi tindakan rasional seorang pembuat keputusan baik individu ataupun negara (Holsti, 1988). Terdapat 2 macam persepsi atau citra yaitu persepsi tertutup dan persepsi terbuka. Persepsi tertutup berarti menolak perubahan serta mengabaikan informasi yang diterima. Lain halnya dengan persepsi terbuka yang berarti menerima semua informasi yang ada walaupun informasi tersebut bertentangan dengan persepsi yang dipegang bahkan mampu mengubah persepsi atau citra yang dipegang agar sesuai dengan kenyataan.

Kebijakan yang dibuat aktor pembuat keputusan dipengaruhi oleh persepsi. Hal ini bergantung pada bagaimana aktor tersebut mendefinisikan situasi sesuai apa yang dia pahami berdasarkan citra atau sistem nilai yang dimiliki aktor tersebut. Oleh karena itu, tindakan atas persepsi sangat tergantung pada citra dan sistem keyakinan yang dianut pembuat keputusan. Persepsi dan citra yang terbentuk dalam aktor pembuat keputusan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ideologi, kepribadian, tingkat serta lingkungan pendidikan, pengalaman masa lampau, status sosial, potensi kerugian dan keuntungan, serta keadaan emosional dalam diri seseorang (Jones W. S., 1992, p. 276).

Melalui bagan 1.1 di atas, terdapat 3 tahapan proses yang menggambarkan bahwa suatu kebijakan atau keputusan dihasilkan dengan didasari oleh persepsi individu terkait pelaku pembuat kebijakan tersebut. Pada tahapan pertama, munculnya suatu rangsangan (isu) dari lingkungan berupa informasi-informasi yang masuk yang kemudian disebut sebagai "*Trigger Event*". Lalu tahapan selanjutnya dimana terdapat upaya untuk mempersepsi stimulus atau citra tersebut. Dalam tahapan ini, seseorang akan

menggunakan penilaian untuk menyeleksi serta menilai berdasarkan citra atau persepsi mereka. Kemudian tahapan terakhir yaitu adanya upaya menafsirkan stimulus tersebut menjadi apapun yang dihasilkan dari persepsi sebelumnya, seperti halnya berupa pengeluaran kebijakan (Harvey, 1996).

Dari teori persepsi ini, maka dapat kita pahami bahwa kebijakan yang diambil Obama dan Trump dapat dipengaruhi oleh persepsi masing-masing. Penulis mencoba menganalisis kasus ini menggunakan teori persepsi untuk mengetahui persepsi Obama dan Trump terkait Perjanjian Paris.

Hasil analisisnya bagaimana kedua persepsi dapat terbentuk. Persepsi masing-masing presiden terbentuk dari informasi yang sama bahwa dunia internasional saat ini sedang mengalami perubahan iklim yang cukup ekstrem yang berdampak pada aktivitas manusia di muka bumi. Hal ini didukung oleh berbagai fakta bencana-bencana yang telah terjadi akibat perubahan iklim serta berbagai fakta ilmiah yang dihasilkan dari temuan para ilmuwan dunia (Gunawan, 2018).

Merespon informasi terkait perubahan iklim, Obama meyakini bahwa perubahan iklim menjadi suatu ancaman terbesar bagi Amerika melebihi isu keamanan lainnya akibat melihat besarnya dampak yang ditimbulkan, dan Perjanjian Paris dianggap sebagai solusi yang baik untuk mengatasi Perubahan Iklim. Keyakinan Obama tersebut juga didukung oleh fakta bahwa nyatanya Amerika telah menjadi negara penyumbang emisi karbon global kedua terbesar yang mencapai 15% sehingga menjadikan Amerika sebagai negara yang memiliki peran penting dalam perjanjian tersebut (Obama White House, 2015).

Munculnya keyakinan yang didukung oleh fakta tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai yang

dimiliki Obama. Nilai-nilai Obama berasal dari dua hal yaitu internal dan eksternal. Internal merupakan nilai yang berasal dari individu Obama itu sendiri, sedangkan eksternal merupakan nilai yang berasal dari pengaruh dari luar dirinya yang mana nilai eksternal tersebut dipengaruhi oleh partai pengusungnya yaitu nilai-nilai Partai Demokrat.

Citra Obama yang terbuka cenderung mudah menerima setiap informasi yang ada. Informasi mengenai temuan para ilmuwan dan ilmu pengetahuan terkait fenomena perubahan iklim dijadikan Obama sebagai rujukan yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan. Nilai internal Obama yang cenderung memiliki citra terbuka tersebut terbentuk dari latar belakang kehidupan Obama itu sendiri yang mana Obama terlahir dari kalangan minoritas kulit hitam dengan ekonomi mengengah ke bawah yang menjadikannya perlu melewati proses yang panjang untuk meraih jenjang karir politiknya.

Selain itu, Obama juga terbiasa berada di lingkungan sosial yang multikultural. Terbukti ketika semasa kecilnya Obama pernah tinggal di berbagai negara. Obama juga banyak mengikuti berbagai komunitas sehingga menjadikannya banyak berinteraksi dengan berbagai kalangan dan lingkungan. Latar belakang tersebutlah yang menjadikan Obama sebagai seorang individu yang memiliki citra terbuka dalam merespon setiap informasi yang ada (Gordon, 2007).

Selain nilai internal, Obama juga dipengaruhi oleh nilai eksternal yang berasal dari partai pengusungnya yaitu Partai Demokrat. Partai demokrat memiliki ideologi liberal dengan karakteristik cenderung bersifat inklusif, internasionalis, dan multilateralis mampu mempengaruhi Obama terkait upaya dalam merespon masalah internasional khususnya terkait isu lingkungan yaitu perubahan

iklim. Selain itu, Demokrat juga memiliki platform untuk memerangi perubahan iklim. Demokrat percaya bahwa cara untuk mengatasi masalah lingkungan yaitu dengan aturan dan kontrol pemerintah (Democratic Party, 2016).

Keyakinan yang didukung oleh fakta yang juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dimiliki Obama seperti yang di atas menjadikan Obama memiliki persepsi bahwa isu lingkungan lebih utama daripada isu keamanan lainnya khususnya isu ekonomi. Persepsi ini yang kemudian memicu kebijakan luar negeri Obama dalam merespon perubahan iklim yang kooperatif dan konsisten dengan komitmen UNFCCC untuk mengeluarkan kebijakan berupa dukungan dan ratifikasi Perjanjian Paris (Klingemann, 2006).

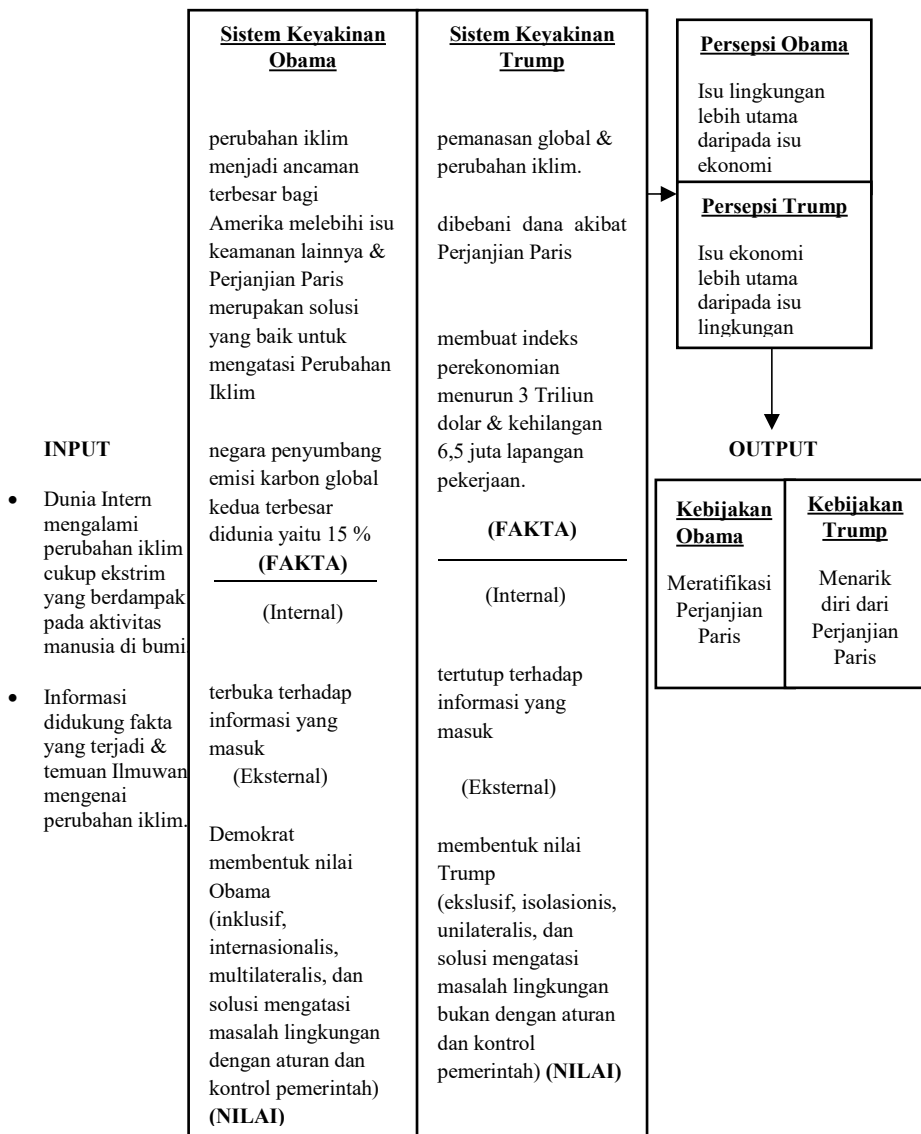
Sedangkan mengenai persepsi Donald Trump, melalui informasi yang sama seperti informasi yang diterima Obama, Trump memiliki keyakinan yang berbeda dengan apa yang menjadi keyakinan Obama. Bagi Trump, isu lingkungan terkait pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah suatu kebohongan publik. Trump tidak meyakini isu tersebut. Disamping itu, Trump juga tidak ingin Amerika dibebani dana akibat Perjanjian Paris karena terdapat penelitian bahwa Perjanjian Paris akan membuat indeks perekonomian Amerika menurun 3 Triliun dolar dan Amerika kehilangan 6,5 juta lapangan pekerjaan (Harun, 2018).

Munculnya keyakinan yang didukung oleh fakta tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai yang dipegang Trump. Nilai-nilai Trump berasal dari dua hal yaitu internal dan eksternal. Internal merupakan nilai yang berasal dari individu Trump itu sendiri, sedangkan eksternal merupakan nilai yang berasal dari pengaruh dari luar dirinya yang mana nilai eksternal tersebut dipengaruhi oleh partai pengusungnya yaitu Partai Republik.

Nilai yang berakar dari individu yaitu berasal dari Citra Trump yang tertutup yang mana cenderung menolak dan mengabaikan informasi yang masuk. Hal ini berlaku ketika Trump mengabaikan informasi terkait temuan para ilmuwan akan masalah perubahan iklim. Nilai tersebut terbentuk dari latar belakang kehidupan Trump yang jika dilihat dan dibandingkan sangat berbanding terbalik dengan latar belakang kehidupan Obama. Trump yang berasal dari kalangan menengah ke atas dengan golongan mayoritas kulit putih terbiasa hidup dengan segala berkecukupan. Kemudian mengenai karir politiknya, karir politik Trump tidak terlepas dari latar belakangnya sebagai seorang pengusaha. Dia juga jarang terlibat dalam gerakan sosial kemasyarakatan sehingga menjadikannya kurang peka terhadap lingkungan dan membuatnya cenderung menutup diri. Hal inilah yang membentuk nilai internal dalam diri Trump yang cenderung memiliki citra tertutup dalam merespon setiap informasi yang ada (Michaud, 2011).

Sedangkan nilai yang berasal dari partai pengusungnya yaitu Partai Republik memiliki ideologi konservatif dengan karakteristik cenderung bersifat eksklusif, isolasionis, unilateralis, serta pandangannya terkait cara mengatasi masalah lingkungan dengan tidak melalui aturan dan kontrol pemerintah; mampu mempengaruhi persepsi Trump terkait perubahan iklim. Trump memiliki persepsi bahwa isu ekonomi justru jauh lebih utama daripada isu lingkungan. Persepsi tersebut yang kemudian menjadikan Trump mengeluarkan kebijakan untuk menarik Amerika dari Perjanjian Paris yang dianggapnya merugikan Amerika. Untuk paparan lebih jelasnya, berikut penulis tuangkan bagaimana persepsi keduanya dapat terbentuk melalui gambar 1.2 di bawah ini.

**Gambar 1.2 Persepsi Obama dan Trump**



(Data diolah dari berbagai sumber)

## **D. Hipotesa**

Melalui analisis di atas dapat ditarik hipotesa bahwa kebijakan yang dikeluarkan kedua Presiden terhadap Perjanjian Paris berbeda dikarenakan adanya perbedaan persepsi diantara keduanya. Obama memiliki persepsi bahwa isu lingkungan lebih utama daripada isu ekonomi. Sedangkan Trump memiliki persepsi bahwa isu ekonomi lebih utama daripada isu lingkungan. Kedua persepsi dipengaruhi oleh nilai serta keyakinan masing-masing presiden.

## **E. Jangkauan Penelitian**

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan mencegah skripsi ini tidak meluas, maka penulis membatasi jangkauan penelitian pada masa periode Amerika Serikat saat dipimpin oleh Barack Obama tahun 2009 - 2017 dan masa periode Amerika Serikat saat dipimpin oleh Donald Trump tahun 2017 – 2019.

## **F. Metodologi**

Berikut terdapat metodologi yang penulis gunakan dalam skripsi ini;

### **1. Metodologi Tipe Penelitian**

Metode tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yang mana penulis mencoba menjelaskan perbedaan persepsi antara 2 (dua) Pemimpin Amerika Serikat dimasa periode nya masing-masing.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data yang penulis ambil dalam mendukung penelitian ini yaitu untuk data primer berasal dari media sosial presiden (*twitter*, *youtube*, dan *website* resmi partai), sedangkan data sekunder berasal dari berbagai sumber literatur berupa jurnal, dokumen, buku, serta artikel.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka (*library research*) untuk mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi. Disamping itu, penulis mengunjungi berbagai situs internet untuk dikumpulkan sebagai data pelengkap.

## 4. Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh akan disusun dengan logis dan sistematis yang kemudian dianalisis secara eksplanasi. Definisi eksplanasi yaitu menjelaskan proses dimana sesuatu dapat terjadi. Melalui teknik eksplanasi artinya mengajak pembaca agar dapat memahami terjadinya suatu proses.

## **G. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alasan mengapa kebijakan yang dikeluarkan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump terhadap kesepakatan Perjanjian Paris mengalami perbedaan. Bagaimana latar belakang



sosial presiden serta partai politik dapat mempengaruhi persepsi kedua presiden dalam memandang Perjanjian Paris sehingga mempengaruhi pula kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing presiden.

## **H. Sistematika Penulisan**

Berikut terdapat sistematika penulisan mengenai hal-hal yang akan dipaparkan dalam setiap bab skripsi ini.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II: POLITIK LINGKUNGAN GLOBAL DALAM UPAYA MENGATASI PERUBAHAN IKLIM**

Bab dua merupakan bab yang membahas mengenai dampak dan penyebab perubahan iklim. Kemudian menjelaskan mengenai dinamika politik lingkungan global dalam mengatasi masalah perubahan iklim dengan membentuk suatu protokol dan perjanjian internasional.

### **BAB III: DINAMIKA KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM ISU LINGKUNGAN**

Bab tiga merupakan bab yang menguraikan serta menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat dalam merespon isu lingkungan.

#### BAB IV: PERBEDAAN PERSEPSI BARACK OBAMA DAN DONALD TRUMP TERKAIT PERJANJIAN PARIS.

Bab empat merupakan bab yang membahas bagaimana proses terbentuknya persepsi Obama dan Trump yang kemudian menjadi latar belakang terjadinya perbedaan kebijakan diantara keduanya.

#### BAB V: KESIMPULAN

Bab lima merupakan bab yang berisikan kesimpulan mengenai hal-hal yang menjadikan kebijakan Presiden Barack Obama dan Donald Trump berbeda dalam menghadapi kesepakatan Perjanjian Paris.